

## **DINAMIKA PENCALONAN PILKADA JAKARTA 2024: ANALISIS KEGAGALAN ANIES BASWEDAN MAJU SEBAGAI CALON GUBERNUR**

**Agus Sutisna<sup>a</sup>, Ahmad Hapid TA<sup>b</sup>, Muhammad Aldi Lubis<sup>c</sup>**

<sup>abc</sup>Universitas Setia Budhi Rangkasbitung, Banten, Indonesia

E-mail: agussutisna@usbr.ac.id

---

### **ABSTRAK**

Menjelang tahapan pencalonan Pilkada Jakarta 2024 sejumlah lembaga survei menempatkan Anies Baswedan pada posisi teratas baik popularitas maupun elektabilitasnya. Hasil sigi ini mendorong beberapa partai politik berencana mengusungnya sebagai bakal calon Gubernur. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahkan sempat mendeklarasikannya sebagai bakal calon Gubernur disandingkan dengan Sohibul Iman sebagai bakal calon Wakil Gubernur. Akan tetapi hingga memasuki hari terakhir masa pendaftaran bakal pasangan calon di KPU Provinsi DKI Jakarta, tidak ada satupun partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan Anies Baswedan maju sebagai calon Gubernur Jakarta pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif; metode pengumpulan data dilakukan dengan kajian literatur dan analisis terhadap dinamika politik yang terekam di berbagai media pemberitaan pada sepanjang fase prakandidasi dan fase kandidasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat faktor yang menyebabkan Anies Baswedan gagal maju atau mendaftar sebagai kandidat Gubernur dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Keempat faktor itu: Pertama, Anies Baswedan bukan kader partai politik; Kedua, Independensi sikap politik Anies Baswedan; Ketiga, menguatnya fenomena partaikrasi dalam lanskap sistem kepartaian; Keempat, menguatnya praktik politik kartel dalam proses kandidasi Pilkada.

**Kata Kunci: Pilkada Jakarta 2024, Anies Baswedan, Partai politik, Partitokrasi, Politik kartel**

### ***DYNAMICS OF CANDIDACY FOR THE 2024 JAKARTA REGIONAL ELECTIONS: ANALYSIS OF ANIES BASWEDAN'S FAILURE TO ADVANCE AS A CANDIDATE FOR GOVERNOR***

#### **ABSTRACT**

*Ahead of the 2024 Jakarta Regional Elections, several survey institutions ranked Anies Baswedan as the most popular and electable figure. This prominence attracted the attention of various political parties, including Partai Keadilan Sejahtera (PKS), which publicly supported his potential pairing with Sohibul Iman. However, by the end of the nomination period, no party or coalition formally registered Anies as a gubernatorial candidate with the Jakarta Provincial Election Commission (KPU). This study examines the underlying factors behind Anies Baswedan's failure to officially enter the race. Employing a qualitative approach, the research draws on literature reviews and media coverage of political dynamics during the pre-candidacy and candidacy phases. The study identifies four main contributing factors: (1) his lack of affiliation with any political party, limiting his influence within party structures; (2) his independent political stance, which diminished his appeal to party elites seeking ideological alignment; (3) the rise of partitocracy, which increasingly sidelines non-party figures in candidate selection; (4) the entrenchment of cartel politics, where*

*parties prioritize strategic and transactional interests over popularity. These dynamics highlight a broader shift in Indonesia's local electoral politics, where party control increasingly overrides public preference.*

**Keywords:** 2024 Jakarta Regional Election, Anies Baswedan, Partitocracy, Cartel Politics

## **PENDAHULUAN**

Sebagaimana ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa Pilkada serentak 2024 diselenggarakan November 2024. Pilkada yang diselenggarakan dalam tahun yang sama dengan Pemilu dan Pilpres ini merupakan Pilkada serentak Gelombang Kelima. Sebelumnya secara kronologis telah diselenggarakan Pilkada serentak Gelombang Pertama 9 Desember 2015, Kedua 15 Februari 2017, Ketiga 27 Juni 2018, dan Keempat 9 Desember 2020 ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)).

Sebagaimana juga Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat (Sodikin, 2014). Melalui Pilkada, seluruh rakyat di daerah yang telah memenuhi syarat normatif sebagai pemilih menggunakan hak politiknya yang dijamin oleh konstitusi untuk memilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia para Kepala dan Wakil Kepala Daerahnya. Dengan cara demikian kepemimpinan daerah diperbarui mandat dan legitimasi politiknya secara berkala (Triono, 2017).

Selain merupakan sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat sekaligus mekanisme rotasi kepemimpinan daerah, Pilkada pada hakikatnya juga merupakan mekanisme untuk memastikan keberlanjutan sekaligus perbaikan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik. Oleh sebab itu kemunculan figur-figur terbaik yang memiliki kelayakan dan kepatutan penting bagi setiap daerah untuk diseleksi lalu diberikan mandat kepemimpinan melalui Pilkada.

Menurut Kacung Marijan (2022: 169-188), Pilkada langsung ini menjadi salah satu aspek penting yang mendapat perhatian para penganut perspektif kelembagaan baru (*new institutionalism*) ketika mendiskusikan isu desentralisasi. Dalam konteks ini, desentralisasi juga berfungsi sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah, terutama untuk mendorong lahirnya pemerintahan yang akuntabel, responsif dan transparan. Pendekatan ini mendalilkan bahwa *“political democracy depends not only on economic and social conditions, but also on the design of political institutions”* (March dan Olsen, 1984). Dan Pilkada merupakan salah satu wujud paling konkret dari upaya penataan kelembagaan politik untuk mengkonsolidasikan demokrasi (Sutisna, 2017: 23-24). Dalam perspektif

yang lebih luas, dengan merujuk Larry Diamond (2003) sebagaimana dikutip Sahdan (2008: 155-157), Pilkada juga merupakan ruang bagi *developing democracy*. Pembangunan demokrasi dalam konteks dimaksud meliputi penguatan *political society*, *economic society*, dan *cultural society*.

Berbasis hasil studi di banyak negara, Brian C. Smith (1998: 85-86) meyakini bahwa perbaikan demokrasi di daerah merupakan prasyarat bagi penguatan konsolidasi demokrasi di aras nasional. Dalam konteks ini Pilkada langsung digagas sebagai ikhtiar untuk mereduksi praktik “pembajakan kekuasaan” oleh partai-partai yang memiliki kursi di DPRD (Marijan, 2022: 183) sekaligus diharapkan bisa menghasilkan para kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat.

Masalahnya kemudian dalam praktik demokrasi elektoral rakyat tidak sepenuhnya memiliki hak dan kesempatan untuk menyiapkan figur-figur terbaik sebagai kandidat Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Secara *de facto* rakyat hanya memiliki hak dan kesempatan memilih pada saat pemungutan suara yang para kandidatnya secara eksklusif ditawarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sebagaimana temuan studi Syamsuddin Haris dkk (2017: vi-vii), bahwa dominasi oligarki parpol dalam menentukan pasangan calon sangatlah kuat. Pada umumnya pasangan calon yang diusung dalam pilkada diputuskan secara terbatas oleh segelintir elite partai. Oleh sebab itu figur yang dikehendaki rakyat belum tentu bisa maju sebagai calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Bahwa tersedia jalur kandidasi perseorangan yang diberikan undang-undang (Perdana dan Mangga Lutung, 2019), yang memungkinkan rakyat dapat berperan lebih aktif dalam proses penyiapan pasangan kandidat, hal ini belum cukup efektif untuk menghasilkan figur-figur kandidat yang dikehendaki rakyat. Fenomena ini terjadi terutama karena terlampau beratnya persyaratan dukungan penduduk yang harus disiapkan para bakal calon perseorangan (Mahpudin, 2020). Studi Mahpudin ini secara konsisten dalam satu dekade terakhir sebangun dengan penilaian para ahli dan pegiat Pilkada di berbagai kesempatan, seperti Titi Anggraini (2016), Sri Budi Eko Wardani (2020), dan Neni Nur Hayati (2024).

Lebih dari itu semua, hegemoni dan pengaruh partai politik dalam perhelatan Pilkada secara umum menenggelamkan jalur pencalonan perseorangan, baik proses maupun popularitas figur-figur yang mencoba mendaftar sebagai bakal calon dan harapan yang bisa dibangunnya dalam preferensi elektoral publik. Para pemilih umumnya cenderung pesimis dengan pasangan calon perseorangan. Itu sebabnya sejak jalur pencalonan perseorangan ini dibuka oleh undang-undang, sangat sedikit pasangan calon yang berhasil memenangi kontestasi Pilkada.

Dalam lanskap fenomena politik Pilkada itulah kegagalan Anies Baswedan untuk maju sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 menarik didiskusikan. Sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai

lembaga survei jauh sebelum memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon, Anies Baswedan adalah salah satu figur yang sangat populer dan merupakan sosok “yang dikehendaki” rakyat Jakarta. Hasil survei Litbang Kompas (*www.kompas.com.*, 16 Juli 2024) misalnya, menempatkan Anies pada posisi teratas dengan elektabilitas 29,8%, disusul Basuki Tjahaja Purnama 20,0%, Ridwan Kamil 8,5%, dan Erick Thohir 2,3%. Figur-figur populer lainnya seperti Sri Mulyani, Tri Rismaharini dll hanya meraih angka 1% kebawah. Survei ini dilakukan pada periode 15-20 Juni 2024. Peta pemeringkatan elektabilitas yang tidak jauh berbeda diperlihatkan oleh Indikator Politik Indonesia yang menempatkan Anies pada posisi puncak dengan angka 39.7%, disusul oleh Basuki Tjahaja Purnama 23,8%, dan Ridwan Kamil 13.1%. Pengambilan data survei ini dilakukan pada periode 18-26 Juni 2024 (*www.katadata.co.id.*, 26 Juli 2024).

Popularitas dan elektabilitas Anies juga relatif stabil bahkan cenderung menguat ketika mendekati fase pendaftaran pasangan calon dibuka oleh KPU DKI Jakarta sebagaimana ditunjukkan oleh hasil sigi Saiful Mujani Research and Consulting (*www.saifulmujani.com.*, 18 Agustus 2024). Hasil survei yang dirilis 18 Agustus 2024 (kurang lebih 10 hari menjelang pembukaan pendaftaran pasangan calon) ini menunjukkan elektabilitas Anies tetap unggul ketika disimulasikan *head to head* dengan figur-figur populer lainnya. Anies unggul dengan angka 42.8% *head to head* dengan Ridwan Kamil yang meraih angka 34.9%. Anies juga unggul dengan angka 37.8% dihadapkan dengan Basuki Tjahaja Purnama 34.3%. Jauh lebih unggul lagi ketika dihadapkan dengan Kaesang Pangarep yang hanya meraih angka 15.0%, sementara Anies 46,5%.

Namun demikian hingga tenggat waktu masa pendaftaran di KPU DKI Jakarta berakhir, tidak ada satupun partai politik yang mengusung Anies Baswedan dan mendaftarkannya sebagai calon Gubernur. Fakta ini merupakan ironi politik yang telah membuat banyak warga Jakarta kecewa.

Untuk kebutuhan studi ini, penulis menggunakan beberapa perspektif teoritik seputar hakikat keberadaan partai politik dan perkembangan mutakhirnya. Sesuai sistematika dan alur pembahasan terhadap 4 (empat) isu yang menjadi faktor penyebab kegagalan Anies Baswedan maju sebagai kandidat Gubernur Jakarta, beberapa perspektif itu meliputi fungsi partai politik, otoritas partai politik dalam kontestasi elektoral, partaikrasi, dan partel kartel.

Salah satu fungsi dasar partai politik merupakan sarana rekrutmen para pemimpin dan pejabat politik, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Partai politik menyeleksi kader-kader terbaiknya kemudian mempromosikannya melalui mekanisme Pemilu untuk merebut dan menduduki jabatan-jabatan politik di berbagai satuan dan tingkatan pemerintahan negara (Budiardjo, 2013: 408-409). Tentu saja partai politik dapat merekrut figur-figur unggul di luar kader partai misalnya *public figur*

untuk dipromosikan menduduki jabatan politik seperti Presiden, anggota Parlemen, Gubernur atau Bupati dan Walikota. Tetapi langkah ini hanya mungkin dilakukan oleh partai politik dengan suatu imbalan tertentu, dan biasanya yang paling penting adalah berupa insentif kekuasaan dan/atau ekonomi yang menguntungkan bagi partainya.

Dalam lanskap mutakhir demokrasi elektoral Indonesia, partai politik memegang peranan dan otoritas sentral sebagai penentu proses kandidasi baik dalam Pileg, Pilpres maupun Pilkada (Hanafi, 2014). Posisi ini tentu tidak salah, bahkan bisa menjadi isyarat bahwa secara kelembagaan partai politik memiliki kemandirian. Hanya saja, dengan otoritas eksklusif yang dimilikinya partai-partai politik kerap terjebak dalam ambisi membangun hegemoni kekuasaan yang memicu lahirnya gejala *Partycracy* dalam lanskap kepolitikan negara. *Partycracy* ini memungkinkan pengendalian atas minimal dua lembaga, yakni eksekutif (Presiden dan Kepala Daerah) dan legislatif (nasional maupun lokal). Dua lembaga itu memiliki hak konstitusional, mulai dari regulasi sampai implementasi, termasuk perekrutan sumber daya manusia (Efriza, 2019).

Istilah *Partycracy* merupakan penggabungan dari kata *Party* (partai politik) dan *Cracy* (pemerintahan). Secara etimologis Partaikrasi artinya kedaulatan di tangan partai. Konsep Partaikrasi merujuk pada situasi dimana partai politik memiliki kekuasaan yang cenderung lebih besar daripada pemerintah yang sebenarnya. Akibatnya kebijakan-kebijakan politik acapkali kurang memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat umum (Bahtiar, 2016). Selain itu, fenomena partaikrasi juga terkait dengan politisasi birokrasi dan tingginya praktik korupsi yang dilakukan atau melibatkan elit-elit partai politik. Merujuk J. Kristiadi (2011), partaikrasi adalah fenomena tatanan politik yang mengatasnamakan demokrasi, tetapi praktiknya parpol menjadi pemain utama dengan melakukan invasi, intrusi, serta penetrasi di berbagai lembaga negara dan publik. Sementara itu Jean Blondel mengungkapkan bahwa dalam model partaikrasi ini partai memainkan peran sentral dalam membentuk kebijakan pemerintah, proses pengambilan keputusan, dan tata kelola secara keseluruhan. Kebijakan negara seolah diwakili oleh partai politik dengan melakukan deal-deal *illegal* dan tidak bermoral (*shady and sleaze deal*) serta melakukan favoritisme demi kejayaan partai (Blondel, 2002: 233-256)

Selain diwarnai fenomena partaikrasi, dinamika kepolitikan mutakhir Indonesia juga ditingkahi oleh gejala politik kartel. Konsep Partai Kartel dipromosikan oleh Richard Katz dan Peter Mair (1995) sebagai model terbaru dari serangkaian model partai yang telah ada sebelumnya, yakni model partai elite (*elite party*), partai massa (mass party), dan *catch-all party*. Menurut Katz dan Mair, Model partai kartel tumbuh seiring dengan proses modernisasi dan birokratisasi masyarakat. Dalam konteks ini, munculnya perluasan pasar politik di satu sisi, dan munculnya agenda sosial baru yang

berpusat pada isu-isu politik baru di sisi lain telah melemahkan afiliasi pemilih terhadap partai tradisional (Yishai, 2001: 669).

Masih merujuk pandangan Katz dan Mair, merosotnya keanggotaan partai dan semakin cairnya pemilih sejak berakhirnya era Perang Dingin menunjukkan gejala bahwa sumber daya ekonomi dan politik partai semakin tidak bergantung pada masyarakat. Sumber daya ekonomi dan politik ini lebih bergantung pada negara, yang mereka kontrol melalui jabatan-jabatan politik yang mereka duduki. Pada sisi lain, gejala tersebut juga menjelaskan, bahwa penurunan afiliasi pemilih terhadap partai merupakan akibat dari perluasan akses warga negara untuk memperjuangkan kepentingannya. Dalam menyampaikan aspirasinya warga tidak lagi hanya mengandalkan partai politik, melainkan juga melalui institusi lain seperti organisasi non-pemerintah dan organisasi masyarakat.

Model partai kartel yang semakin menguat sejak tahun 1970-an menyerupai model *catch-all party* dalam banyak hal, misalnya terkait kampanye yang menggunakan jasa profesional dan mengandalkan dana dalam jumlah besar, keanggotaan yang menyusut, dan pendekatan *broker* untuk memperoleh suara. Akan tetapi, partai-partai kartel dibedakan dari tiga model partai sebelumnya dalam hal “interpenetrasi partai dan negara” dan “pola kolusi antarpartai” (Katz and Mair 2002: 17). Tidak seperti *catch-all party*, partai kartel hampir secara eksklusif bergantung pada negara untuk pendanaan mereka dan sumber daya politik lainnya. Karena itu, tidak mengherankan, fokus strategi partai lebih ditujukan kepada negara dibanding masyarakat luas. Partai yang sibuk dengan dirinya, dan dengan negara, kemudian melebarkan jarak terhadap masyarakat atau pemilihnya (Katz and Mair 1996: 526).

Dalam situasi demikian itulah maka sebagai suatu fenomena sistem kepartaian, model partai kartel menunjukkan perilaku dimana partai-partai politik sebagian besar lebih memilih bergabung untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka di area negara, baik untuk memenangkan pemilihan maupun untuk mengendalikan sumber daya politik dan ekonomi. MacIvor (1996) menyimpulkan bahwa partai kartel secara kolektif mengontrol sumber daya negara yang mereka manipulasi untuk menjamin kelangsungan hidup mereka.

Merujuk studi Ambardi (2009), kartelisasi ini dilakukan oleh partai politik untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup mereka yang sangat bergantung dan ditentukan oleh kepentingan bersama untuk memperoleh berbagai sumber keuangan yang menjadi bahan bakar organisasi partai. Dan ini hanya mungkin dilakukan jika partai-partai memiliki akses dalam jabatan pemerintahan dan parlemen. Dengan demikian tujuan utama partai-partai yang terlibat dalam praktik politik kartel bukanlah kepentingan masyarakat tetapi kepentingan kelompoknya (Lestari, 2017). Mereka bekerja sama bukan hanya untuk mengamankan kemenangan bagi

kandidat mereka, tetapi juga untuk menjaga stabilitas kekuasaan yang telah mereka bangun.

Ambardi kemudian memetakan lima penanda praktik politik kartel dalam sistem kepartaian Indonesia mutakhir. Yaitu (1) Hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai, (2) Sikap permisif dalam pembentukan koalisi, (3) Tidak adanya oposisi, (4) Hasil-hasil pemilu hampir-hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik dan (5) Kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. Kelima ciri ini berlawanan dengan sifat umum sistem kepartaian yang kompetitif.

Dengan menggunakan perspektif sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang secara hipotetik menjadi penyebab gagalnya Anies Baswedan untuk maju sebagai calon Gubernur Jakarta 2024-2029. Faktor-faktor dimaksud adalah sebagai berikut: *Pertama*, Anies Baswedan bukan merupakan anggota atau kader partai politik. *Kedua*, pilihan sikap politik Anies Baswedan yang konsisten berada di garis independen. *Ketiga*, menguatnya gejala partai krali dalam lanskap kepolitikan nasional. *Keempat*, menguatnya praktik politik kartel pada sebagian besar partai politik di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan, yang sepenuhnya didasarkan pada sumber-sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen tertulis; meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundangan, serta artikel baik berupa pemberitaan, wawancara dan opini di berbagai portal media, termasuk beberapa situs organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif.

Data dan informasi dalam penelitian ini dieksplorasi dan dihimpun (*data collection*) melalui teknik dokumen. Kemudian sesuai karakteristik pendekatan kualitatif teknik analisis data dalam studi dilakukan simultan dengan tahapan pengumpulan data. Artinya analisis dilakukan pada setiap fase pengumpulan data, meliputi fase pertama analisis dilakukan pada saat peneliti mulai mengumpulkan berbagai data sekunder. Kemudian fase kedua analisis adalah menentukan fokus isu apa saja yang menjadi sentral kajian melalui teknik analisis taksonomi (pengkategorian isu-isu yang relevan). Dan terakhir fase ketiga analisis data dilakukan dengan teknik analisis komponensial terhadap bagian-bagian dari setiap isu pembahasan yang relevan (Sugiyono, 2008: 222-253; Harison, 2009: 85-100).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peta Statis Kekuatan Politik Kandidasi Pilkada DKI Jakarta**

Akhir Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) *melaunching* tahapan Pilkada serentak tahun 2024. Di dalam *Peraturan KPU Nomor 2*

*Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024* disebutkan, bahwa masa pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hingga penetapan pasangan calon berlangsung dalam rentang waktu 27 Agustus 2024 sampai dengan 22 September 2024.

Di berbagai daerah beberapa figur populer yang dinilai layak menjadi calon Gubernur mulai beredar namanya, demikian halnya di Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana dikemukakan didepan, dalam konteks Pilgub Jakarta, Anies Baswedan muncul sebagai figur paling populer berdasarkan lembaga-lembaga survei. Namun hingga pendaftaran pasangan calon ditutup oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, Kamis 29 Agustus 2024 tidak ada satupun partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur (*www.cnnindonesia.com.*, 30 Agustus 2024). Selanjutnya sesuai tahapan dan jadwal, 22 September 2024 KPU DKI Jakarta resmi menetapkan 3 (tiga) pasangan calon, tanpa nama Anies Baswedan (*www.tempo.co.*, 23 September 2024). Ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur itu adalah Ridwan Kamil dan Suswono, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto, dan Pramono Anung dan Rano Karno.

Berdasarkan *Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 125 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024* dan *Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024* (*www.kpu.go.id*), peta kekuatan politik kandidasi Pilkada DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono dicalonkan oleh 14 partai politik yaitu: PKS, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Golkar, PKB, PAN, PSI, Partai Demokrat, Partai Perindo, PPP, Partai Gelora, Partai Garuda, PBB, dan PKN. Keempatbelas partai politik ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dengan akumulasi suara hasil Pemilu legislatif tahun 2024 sebanyak 83,46%. Koalisi ini didukung oleh Presiden Prabowo, mantan Presiden Jokowi dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pasangan Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana maju melalui jalur pencalonan perseorangan dengan didukung sebanyak 677.065 pemilih yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta. Pasangan Nomor Urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno dicalonkan oleh 2 partai politik, yakni PDIP dan Partai Hanura dengan akumulasi suara hasil Pemilu legislatif tahun 2024 sebanyak 16.54%.

Berdasarkan temuan riset, sedikitnya terdapat 4 (empat) faktor yang menjadi penyebab kegagalan Anies Baswedan maju sebagai Calon Gubernur Jakarta 2024-2029. Keempat faktor tersebut meliputi 2 (dua) faktor internal

dan 2 (dua) faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang melekat dalam pribadi, aktivitas sekaligus menjadi karakteristik Anies Baswedan hingga menjelang perhelatan Pilkada 2024. Sedangkan faktor eksternal adalah fenomena politik, khususnya politik elektoral yang mewarnai perilaku partai-partai politik dalam konteks kandidasi Pilkada, yang dengan sendirinya berada diluar kontrol Anies Baswedan. Dua faktor internal yang dimaksud adalah: *Pertama*, Anies Baswedan bukan kader partai politik; dan *Kedua*, independensi sikap politik Anies Baswedan. Sedangkan dua faktor eksternal adalah: *Pertama*, menguatnya gejala partaikrasi dalam lanskap sistem kepartaian Indonesia, khususnya berkenaan dengan momen perhelatan Pilkada; dan *Kedua*, praktik politik kartel dalam proses kandidasi Pilkada Jakarta Tahun 2024.

### **Faktor Anies Baswedan Bukan Kader Partai Politik**

Dalam tradisi demokrasi sumber utama kepemimpinan politik pemerintahan negara adalah partai politik. Melalui partai politik warga negara yang dinilai memiliki kapasitas dan kompetensi kepemimpinan dipersiapkan dan dipromosikan menjadi kandidat-kandidat pemimpin negara atau daerah. Premis ini juga sejalan dengan salah satu fungsi utama partai politik sebagai sarana rekrutmen politik (Budiardjo, 2013: 208-209; Surbakti, 2007: 116-121).

Sementara itu, dilihat dari perspektif kepentingan kaderisasi dan visi jangka panjang partai politik dalam konteks kepemimpinan, baik nasional maupun daerah, partai politik juga akan lebih memilih memprioritaskan kader-kader internalnya untuk dipromosikan sebagai pemimpin. Pilihan sikap ini sejalan dengan hakikat tujuan keberadaan partai politik, yakni merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam rangka menjalankan program-program partai politik (Budiardjo, 2013: 404).

Secara teoritik pemikiran serupa itulah sesungguhnya yang mendasari sikap dan kebijakan partai-partai politik dalam konteks kandidasi Pilkada Jakarta 2024. Bahwa beberapa partai sempat menyebut nama Anies Baswedan yang bukan kader sebagai figur yang akan dipromosikan, penyebutan ini lebih merupakan pilihan yang bersifat sementara dan dinamis yang dilakukan tetap dalam kerangka kepentingan partai politik terakomodasi.

Demikianlah misalnya yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kamis 20 Juni 2024, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS memutuskan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur dan Mohamad Sohibul Iman sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 ([www.pks.id](http://www.pks.id)). Keputusan ini kemudian diumumkan secara resmi oleh Ahmad Syaikh, Presiden PKS pada kegiatan Sekolah Kepemimpinan Partai di Jakarta, Selasa 25 Juni 2024 ([www.kompas.id](http://www.kompas.id), 25 Juni 2024).

Langkah PKS yang terbilang sigap dalam mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta itu menunjukkan dengan jelas, bahwa PKS tidak begitu saja menggelar “karpet merah” buat Anies, tanpa menghitung kepentingan politik elektoral internalnya. Hal ini ditunjukkan dengan menyiapkan kader internalnya, Sohibil Iman sebagai bakal pendamping Anies tanpa melihat lagi popularitas dan potensi elektabilitas Iman untuk dipromosikan memimpin Jakarta.

Di kemudian hari, yakni pada saat PKS akhirnya mengalihkan haluan politik dan dukungan elektoralnya kepada Ridwan Kamil yang diusung KIM Plus, kalkulasi kepentingan internal bahwa sebisa mungkin diantara dua figur dari pasangan Cagub-Cawagub salah satunya harus berasal dari kader internal semakin jelas. Secara politik tentu saja hal ini bisa dipahami dalam kerangka pikir tadi, terlebih lagi di Jakarta PKS merupakan partai pemenang Pemilu 2024 dengan raihan kursi terbanyak di DPRD Provinsi DKI Jakarta, yakni 18 kursi (*www.tempo.co.*, 12 Maret 2024).

Keputusan PKS bakal mengusung Anies Baswedan direspon beragam oleh partai politik, baik partai politik yang pernah bersama-sama dalam koalisi Pilpres, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maupun partai politik yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, misalnya Partai Amanat Nasional (PAN).

PKB melihat penyandingan Anies dan Iman dalam paket pasangan Cagub-Cawagub merupakan blunder karena bisa menutup komunikasi dengan partai lain. Hal ini dikemukakan oleh Syaiful Huda, Wakil Sekjen PKB (*www.tempo.co.*, 27 Juni 2024). Pernyataan Huda tentu sangat beralasan karena meski menjadi pemenang Pileg di Provinsi DKI Jakarta, PKS tetap saja tidak bisa mengusung sendiri bakal pasangan Cagub-Cawagub karena raihan kursinya tidak memenuhi ambang batas (*threshold*) pencalonan Kepala Daerah sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 sebelum MK menerbitkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024). Merujuk keterangan Dody Wijaya, Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta, bahwa untuk Pilkada DKI syarat minimal kursi di DPRD Provinsi agar dapat mengajukan pasangan calon adalah 22 kursi (*www.kompas.com*, 29 April 2024). Sementara PKS hanya meraih 18 kursi pada Pileg 2024. Dalam posisi demikian jelas PKS membutuhkan partai lain untuk diajak kerjasama dalam satu barisan koalisi pencalonan.

Dalam kerangka kepentingan politik elektoral partai, pernyataan Huda itu juga menunjukkan bahwa partai-partai sangat berkepentingan untuk mempromosikan kader internalnya sebagai Cagub atau Cawagub. Dan dalam konteks kandidasi Pilkada Jakarta, PKB juga sudah menyiapkan salah satu kadernya, Ida Fauziyah yang berpeluang untuk dipromosikan sebagai bakal Cawagub mendampingi Anies. Dalam konteks inilah pernyataan Huda itu bisa difahami. Bahwa penetapan dan Deklarasi Anies-

Iman oleh PKS praktis menutup peluang komunikasi dengan partai lain untuk mempromosikan sekaligus mengkompromikan posisi bakal Cawagub.

Selain PKB, Partai Nasdem juga telah menyiapkan kader-kader internalnya yang dapat dipromosikan sebagai bakal pendamping Anies. Salah satunya adalah Ahmad Sahroni, Bendahara Umum Nasdem yang cukup populer di Jakarta. Tetapi yang lebih menarik, minat untuk menawarkan figur bakal pendamping Anies juga dikemukakan oleh PAN, anggota KIM yang merupakan kompetitor Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN.

Kepada media, Yandri mengungkapkan bahwa PAN terbuka mendukung Anies sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024, asalkan pasangannya adalah Zita Anjani ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), 22 Juli 2024). Zita adalah putri Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Fakta ini semakin memperjelas bahwa partai-partai memang sangat berkepentingan untuk mempromosikan kader internalnya dalam Pilkada DKI Jakarta. Jika bukan sebagai bakal Cagub, maka paling tidak sebagai bakal Cawagub.

Di tengah ambisi partai-partai untuk memajukan kader internalnya dalam kontestasi Pilkada Jakarta berhembus isu lama saat memasuki tahapan kandidasi Pilpres 2024, bahwa kekuasaan (merujuk pada dua figur sentral kepolitikan elektoral, yakni Jokowi dan Prabowo) tidak ingin Anies Baswedan maju sebagai Calon Gubernur Jakarta. Meski tidak mudah dibuktikan secara otentik, faktanya kemudian berbagai manuver politik yang mengarah pada indikasi adanya penjegalan Anies memang terbaca. Manuver yang paling menonjol dilakukan oleh KIM Plus yang tiba-tiba saja mengajak PKS bergabung dengan memberikan tawaran posisi sebagai bakal Cawagub mendampingi Ridwan Kamil yang sudah mereka siapkan. Sebelumnya KIM Plus juga telah berhasil menarik PKB dan Nasdem ke dalam barisan koalisinya.

Pada tanggal 19 Agustus 2024, KIM Plus akhirnya mendeklarasikan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Suswono adalah kader PKS yang pernah menjabat Menteri Pertanian di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan deklarasi ini peluang Anies untuk memimpin kembali Jakarta praktis tertutup.

Terlepas dari manuver KIM Plus dan isu penjegalan oleh kekuasaan serta berubahnya haluan politik elektoral PKS, Nasdem dan PKB, kiranya cukup jelas bahwa kegagalan Anies maju sebagai calon gubernur salah satu faktor penyebabnya adalah karena tidak ada partai politik yang dapat menjadi sandaran bagi pencalonannya. Anies bukan anggota apalagi kader partai manapun, yang dalam konteks perhelatan Pilkada partai-partai ini terbukti sangat berkepentingan untuk memprioritaskan kader internalnya. Pada titik ini, popularitas maupun elektabilitas saja terbukti tidak cukup untuk bisa mengantarkan seorang figur bahkan yang oleh publik dinilai

memiliki kompetensi, kecakapan dan integritas sekalipun. Ia butuh sandaran untuk maju, dan sandaran itu tidak lain adalah partai politik.

Fakta bahwa Anies gagal maju sebagai Cagub karena bukan kader partai politik juga semakin dikuatkan oleh pilihan sikap PDIP yang sempat terbuka peluangnya untuk maju sendiri tanpa harus koalisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah secara progresif ketentuan ambang batas (*threshold*) pencalonan. PDIP yang nyaris tidak dapat ikut serta dalam perhelatan Pilkada Jakarta karena semua partai parlemen diborong habis dan merapat ke kubu KIM Plus, dengan putusan MK tersebut akhirnya bisa mengajukan sendiri bakal pasangan Cagub-Cawagub.

Saat itu sempat beredar kabar, bahwa PDIP akan mengusung Anies sebagai bakal Cagub didampingi Rano Karno, mantan Gubernur Banten. Kabar ini mendapat respon positif dari warga Jakarta. Tetapi mendekati masa *injury time* pendaftaran, PDIP secara resmi mengajukan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Berbagai sumber antara lain Adi Prayitno, analis politik UIN Jakarta menyebutkan, bahwa batalnya PDIP mengusung Anies karena tidak ada titik temu antara Anies dan PDIP oleh sebab faktor ideologis ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), 31 Agustus 2024). Pandangan ini sekaligus mengonfirmasi bahwa problem utamanya karena Anies bukan kader PDIP.

### **Faktor Independensi Sikap Politik Anies Baswedan**

Faktor kedua yang menjadi penyebab gagalnya Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur Jakarta adalah karena pilihan sikap politiknya yang independen. Frasa “sikap politik independen” Anies Baswedan ini merujuk pada tiga fakta dalam sepanjang karirnya di dunia politik. *Pertama*, Anies tidak pernah menjadi anggota dan kader partai politik. *Kedua*, Anies berusaha menunjukkan diri sebagai figur yang bisa masuk ke kelompok atau kekuatan politik manapun; Anies adalah sosok inklusif, baik dalam pikiran maupun aktivitas keseharian. *Ketiga*, Anies konsisten menjaga jarak dari, sekaligus kritis terhadap kekuasaan, terutama pasca perhelatan Pilpres 2024 yang secara elektoral posisinya menjadi kompetitor Prabowo-Gibran yang didukung pemerintahan Jokowi-Maruf.

Pilihan sikap independen secara politik ini tentu tidak tumbuh tanpa akar yang otentik secara sosiologis. Selain aktivis yang terbiasa bersikap kritis, Anies adalah juga seorang akademisi dan intelektual, dua kategori yang telah memberinya basis kuat dalam kiprahnya di dunia politik. Kiprahnya sebagai akademisi dan intelektual dapat ditelusuri dari rekam jejaknya. Anies pernah menjabat Rektor Universitas Paramadina dua periode (2007-2015). Otoritas Anies sebagai akademisi dan intelektual, bukan hanya diakui di dalam negeri, melainkan juga di forum internasional ([www.aniesbaswedan.com](http://www.aniesbaswedan.com)). Beberapa diantaranya adalah dari Majalah Foreign Policy (2008) sebagai salah satu *Top 100 Public Intellectuals* karena

pemikirannya telah dimanfaatkan lebih dari sekadar untuk memajukan ilmu pengetahuan di kampus, tapi secara aktif bermanfaat untuk mendorong perubahan dan kemajuan di masyarakat; dan *Nakasone Yasuhiro Awards* dari Institute for International Policy Studies, Jepang (2010). Penghargaan ini diberikan untuk pencapaian tinggi di bidang politik, ekonomi, budaya, sains dan teknologi dan untuk mendorong usaha lebih jauh yang akan menyumbang pada pencapaian perdamaian dan kesejahteraan yang sesungguhnya dalam komunitas internasional.

Di dunia politik kiprah Anies diawali tahun 2013 ketika mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat dari kalangan eksternal dan non-afiliasi partai politik. Pada Pilpres 2014, Anies bergabung kedalam Tim Pemenangan Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Juru Bicara. Kemudian ditunjuk menjadi Deputy Kantor Transisi setelah Jokowi-Kalla memenangi kontestasi Pilpres 2014. Dan akhirnya dipercaya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-Kalla. Semua jabatan politik ini dimasuki Anies dalam kapasitas sebagai figur independen yang terbebas dari ikatan dan afiliasi partai politik (*www.tirto.id*, 29 Januari 2023).

Demikian pula halnya ketika Anies dipromosikan sebagai calon Gubernur Jakarta pada Pilkada 2017 oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipasangkan dengan Sandiaga Uno sebagai calon Wakil Gubernur. Anies diusung sebagai calon Gubernur Jakarta dalam kapasitas sebagai figur independen, bukan anggota Partai Gerindra maupun kader PKS. Peristiwa yang sama juga terjadi pada perhelatan Pilpres 2024, dimana Anies sebagai Capres yang dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres, diusung oleh Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) yang terdiri dari tiga partai, yakni Nasdem, PKS dan PKB. Anies berhasil menghimpun kepercayaan ketiga partai pengusungnya ini dalam kapasitas sebagai seorang figur independen, bukan anggota maupun kader salah satu partai pengusungnya.

Dari fakta-fakta terurai di atas nampak jelas Anies berhasil meniti karir politik dalam kapasitas sebagai figur independen. Mulai dari ikut kompetisi dalam sebuah konvensi partai politik untuk calon Presiden, terlibat dalam Tim Transisi pemerintahan hasil Pilpres, menduduki jabatan Menteri di kabinet, menjabat Gubernur, hingga terakhir menjadi Calon Presiden meski gagal memenangi kontestasi. Semuanya adalah capaian-capaian prestatif yang tidak mudah diraih oleh seorang figur yang bukan berasal dari, dan tidak dibesarkan dalam lingkungan partai politik.

Namun di sisi lain sebagai seorang figur independen di dunia politik yang serba pragmatis, Anies dengan sendirinya juga memiliki kekurangan yang tidak mudah ditutupi oleh kelebihan apapun yang melekat dalam pribadinya. Kekurangan itu tidak lain adalah pijakan dan sandaran politik

dengan apa Anies bisa mengandalkannya sebagai instrumen untuk memperjuangkan gagasan-gagasan politiknya.

Dalam sudut pandang yang terkesan negatif, posisi dan kapasitasnya sebagai figur independen yang berusaha meniti karir di dunia politik; memperjuangkan gagasan-gagasan politik dan berusaha meraih kekuasaan untuk mewujudkan gagasan-gagasan itu tanpa merasa harus menjadi bagian dari kader partai terlebih dahulu karena lebih percaya dengan aspek popularitas kerap dianggap sebagai suatu kesombongan. Dalam kaitan inilah Fahri Hamzah misalnya, politisi Partai Gelora, menyarankan Anies untuk introspeksi ketika ia gagal diusung oleh partai politik dalam Pilkada Jakarta (*www.tirto.id.*, 12 Agustus 2024). Menurut Fahri, Pilkada sekarang sangat mengandalkan sistem tiket, dan pemilik otoritas tiket itu adalah partai politik. Dengan sistem ini popularitas yang selama ini diandalkan Anies, dalam kerangka Pilkada Jakarta menjadi tidak berguna.

Bahwa di Pilpres 2024 Anies berhasil menghimpun kepercayaan tiga partai untuk mengusungnya sebagai Capres dengan hanya modal popularitas, Fahri mengungkapkan bahwa situasi dan kerangka kepentingannya berbeda. Di Pilpres Anies dibutuhkan lebih karena kepentingan partai-partai agar bisa bertahan di parlemen (*www.kumparan.com.*, 12 Agustus 2024). Analisis Fahri dapat dimaknai bahwa dengan mengusung Anies partai-partai itu berharap memperoleh efek ekor jas (*coattail effect*) dari Capres yang mereka promosikan, dan sedikit banyak analisis Fahri kemudian memang terbukti. Nasdem, PKS dan PKB berhasil mempertahankan posisinya sebagai partai yang lolos ke parlemen, dan ini antara lain karena efek ekor jas yang dihasilkan dari figur Anies sebagai calon Presiden.

Ketiga partai pengusung Anies pada Pilpres 2024 telah berhasil, bukan hanya melampaui ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), tetapi juga berhasil meningkatkan perolehan suaranya dibanding Pemilu 2019 (*www.kompas.com.*, 24 Maret 2024). Partai Nasdem naik dari 12.661.792 suara pada Pemilu 2019 menjadi 14.660.516 suara pada Pemilu 2024. PKS yang meraup 11.493.663 suara pada Pemilu 2019 menjadi 12.781.353 pada Pemilu 2024. Dan PKB yang meraih 13.570.970 suara pada Pemilu 2019 naik menjadi 16.115.655 suara pada Pemilu 2024.

Di sisi lain, Anies sendiri bukan tanpa hasil meski gagal memenangi kontestasi Pilpres. Anies berhasil menjaga popularitasnya setelah perhelatan Pilpres berakhir, dan ini sesungguhnya menjadi modal penting dalam menghadapi perhelatan Pilkada yang jaraknya tidak terpaut jauh dari Pilpres. Sebagaimana sudah disinggung di depan, menjelang tahapan Pilkada dimulai, semua lembaga survei menempatkan elektabilitas Anies dalam posisi teratas hasil sigi mereka. Namun sebagaimana juga sudah dikemukakan didepan, faktanya kemudian popularitas dan elektabilitas Anies gagal mengantarkannya ke arena kontestasi Pilkada Jakarta. Dan ini

sekali lagi, karena Anies adalah figur independen yang tidak memiliki sandaran kuat yakni partai politik, yang dalam konteks demokrasi elektoral perannya sangat determinatif. Partai bukan saja pemilik tiket kontestasi elektoral, tetapi juga menjadi penentu arah dan haluan kebijakan bagaimana mereka menyikapi perhelatan Pilkada dalam kerangka kepentingan internal jangka pendek maupun jangka panjang masing-masing.

Satu hal lagi, masih dalam konteks kegagalan Anies maju sebagai calon Gubernur Jakarta. Sebagai figur independen, yang menjadikan dunia aktivis, akademisi dan intelektual sebagai basis kiprahnya di arena politik, Anies berhasil menjaga konsistensinya dalam menyikapi berbagai isu politik, termasuk sikap kritisnya terhadap pemerintah. Konsistensi ini diperlihatkan Anies bahkan ketika partai-partai pengusungnya di Pilpres 2024 merapat ke kubu KIM Plus yang didukung kekuasaan. Namun konsistensi sikap ini pula yang justru melemahkan posisinya. Anies dianggap merupakan ancaman, atau setidaknya potensial bakal menjadi pengganggu kekuasaan. Karena itu semua pintu demokrasi elektoral harus ditutup untuk Anies. Dalam ungkapan yang populer di ruang publik: Anies harus dijegal dan jangan sampai lolos ke arena kontestasi.

Meski tidak mudah dibuktikan, berbagai manuver elit baik di lingkaran kekuasaan maupun partai politik terbaca jelas mengarah ke upaya penyingkiran Anies dari kontestasi Pilkada Jakarta. Manuver-manuver politik untuk menggagalkan Anies ini diulas antara lain dalam Majalah Tempo edisi 11 Agustus 2024 ([www.tempo.co](http://www.tempo.co)., 11 Agustus 2024). Dalam analisisnya Tempo menguraikan bagaimana Jokowi dan KIM-Prabowo Subianto bergerilya menggagalkan pencalonan Anies di Pilgub Jakarta. Analisis serupa juga dikemukakan oleh Denny J.A, Direktur Lingkaran Survei Indonesia ([www.tempo.co](http://www.tempo.co)., 1 September 2024). Denny mengungkapkan, bahwa Anies memang sengaja dikalahkan sebelum bertanding, dan ini melibatkan secara langsung atau tidak langsung empat sosok Presiden dan mantan Presiden sekaligus. Pangkal sebabnya karena ada persoalan dalam relasi Anies dengan keempat tokoh itu.

Sebagaimana terbaca isyaratnya melalui berbagai media, Jokowi kerap terlihat tidak nyaman dengan sikap kritis Anies terutama terkait program Ibu Kota Nusantara (IKN). Anies bahkan secara terbuka menentang program ambisius Jokowi ini, baik dalam kampanye Pilpres maupun di luar kampanye. SBY pernah dikecewakan oleh Anies karena dianggap mengkhianati dirinya dan Demokrat ketika ia meninggalkan Agus Harimurti Yudhoyono dan Demokrat di masa pra kandidasi Pilpres. Prabowo marah terhadap Anies terkait penilaian Anies yang dianggap merendahkan terhadap kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan di era Jokowi dengan memberinya nilai “11 persen dari 100”. Dan dengan Megawati, Anies pernah berseteru dalam rivalitas yang keras di Pilkada Jakarta 2017 silam. Anies

dan Megawati juga berbeda secara ideologis; Anies agamis, Megawati nasionalis.

Dalam situasi demikian, sebagai figur independen yang hanya mengandalkan kapasitas pribadi dan dukungan publik yang tidak memiliki otoritas untuk mengambil keputusan apapun dalam kerangka politik elektoral, sekali lagi Anies tidak memiliki pijakan dan sandaran kokoh yang dapat membelanya dari upaya-upaya penjegalan kekuasaan oleh lawan-lawan politiknya.

### **Faktor Gejala Partitokrasi dalam Kandidasi Pilkada 2024**

Faktor ketiga yang menyebabkan Anies Baswedan gagal maju sebagai Calon Gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 adalah menguatnya gejala partaikrasi yang merangsak masuk ke perhelatan Pilkada. Faktor ini bersifat eksternal karena ia merupakan gejala umum yang berada diluar dikontrol pribadi Anies.

Beberapa tahun lalu, gejala ini sudah diprediksi oleh para ahli dan pengamat akan tumbuh dan menguat dalam sistem politik Indonesia modern. Peneliti politik LIPI yang juga mantan Menteri Riset dan Teknologi di era pemerintahan Gus Dur, Hikam misalnya. Dalam sebuah diskusi bertajuk "*Pemetaan Potensi Konflik dan Resiko Politik*" di Jakarta, Hikam sudah mengingatkan bahwa gejala partitokrasi akan tumbuh menguat pasca Pemilu 2019 (*www.beritasatu.com.*, 22 Maret 2019). Hikam memberi contoh bagaimana penentuan calon Wakil Presiden yang mendampingi Joko Widodo di Pemilu 2019, yang ditentukan oleh partai politik dengan menegasikan keinginan dari calon Presidennya sendiri.

Jauh sebelum Hikam mengingatkan, Kristiadi, peneliti senior CSIS juga sudah membaca pertumbuhan gejala ini. Ia melihat gejala partaikrasi ini tumbuh menguat di lembaga DPR dalam kaitannya dengan tuntutan sejumlah anggota parlemen itu untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena banyak koleganya di parlemen tersangkut kasus korupsi dan diperiksa KPK, bahkan menjadi tersangka. Kristiadi juga mengungkapkan bahwa intervensi dan penyusupan juga dilakukan oleh partai-partai politik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga independen yang seharusnya steril dari kepentingan partai politik (*www.kompas.com.*, 11 Oktober 2011).

Dalam konteks perhelatan Pilkada serentak 2024, gejala partaikrasi ini menguat di banyak daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Bentuk kongkritnya adalah dominannya peran partai politik dalam menentukan figur-figur calon kepala daerah dengan mengabaikan suara-suara jernih masyarakat di daerah yang bersangkutan baik yang diartikulasikan melalui saluran-saluran demokrasi seperti media dan Ormas maupun yang terungkap sebagai temuan survei ilmiah oleh lembaga-lembaga survei. Demikianlah yang terjadi pada Pilkada Jakarta dalam

kaitannya dengan kegagalan Anies maju sebagai Calon Gubernur. Gejala partaikrasi dalam proses kandidasi Pilkada Jakarta terbaca sangat menonjol di kubu KIM Plus yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono.

Beberapa bulan sebelum kubu KIM Plus mencalonkan RK-Suswono, sebagian besar warga Jakarta sebagaimana ditunjukkan oleh hasil sigi lembaga-lembaga survei dan suara-suara publik yang tersebar di berbagai platform media sosial menghendaki Anies dan Ahok. Anies diminati oleh para pemilih tiga partai pengusungnya pada waktu Pilpres, sementara Ahok diminati oleh basis massa PDIP dan pemilih yang trauma dengan residu politik identitas di Pilkada Jakarta 2017 silam.

Di sisi lain Ridwan Kamil sendiri secara pribadi sebetulnya lebih memilih untuk maju di Jawa Barat. Kepada media ia sempat mengemukakan bahwa maju di Jawa Barat lebih nyaman, mudah menangnya menurut hitungan matematis dan survei (*www.detiknews.com.*, 24 Juli 2024). Preferensi ini awalnya sama dengan sikap partainya sendiri, Golkar ketika masih dipimpin Airlangga Hartarto sebagaimana dikemukakan oleh Ace Hasan Syadzily, fungsionaris DPP Golkar (*www.detiknews.com.*, 7 Maret 2024). Tetapi Gerindra, atau lebih tepatnya Prabowo Subianto, yang merupakan *leader* di kubu KIM Plus dan dengan sendirinya bertindak lebih sebagai Ketua Umum partai menghendaki Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta. Pilihan akhirnya semua partai di kubu KIM Plus mengikuti keinginan Gerindra dan Prabowo dalam kapasitas sebagai Ketua Umum partai yang dalam konteks tarik-menarik ini semua partai termasuk tiga partai pengusung Anies di Pilpres yakni Nasdem, PKS dan PKB pada akhirnya juga sepakat “memaksa” Ridwan Kamil maju di Jakarta.

Kasus maju di Pilkada Jakarta dengan “setengah terpaksa” yang dialami Ridwan Kamil menunjukkan betapa peran partai politik sangat hegemonik dan determinatif dalam proses kandidasi Pilkada Jakarta. Ridwan Kamil jelas lebih memilih bertarung di Jawa Barat, tapi karena partai-partai di kubu KIM Plus menghendaki dirinya maju di Jakarta, maka tidak ada pilihan lain, Ridwan Kamil akhirnya maju bersama Suswono di Jakarta, dan hasilnya memang tidak membuat nyaman Ridwan Kamil. Dalam kasus Ridwan Kamil, fenomena partaikrasi juga telah mengesampingkan intuisi politik dirinya sebagai kandidat yang mestinya perlu dipertimbangkan karena pengalamannya.

Satu hal yang penting menjadi catatan dalam konteks pengusungan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta adalah terkait posisi dan sikap pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Sesuai regulasi mestinya pemerintah pusat mengambil posisi dan sikap netral dalam kontestasi Pilkada, termasuk di Pilkada Jakarta. Inilah politik kebijakan Pilkada yang seharusnya dipegang teguh pemerintah pusat. Namun fakta yang kemudian terjadi adalah Presiden Prabowo (dan semua pembantunya di Kabinet yang

menjadi pimpinan partai politik) secara terbuka menunjukkan keberpihakan politik elektoralnya. Dan ini dilakukan tidak sekedar memberikan *endorsement*, tetapi juga merencanakan secara kolektif proses kandidasi melalui institusi KIM Plus, termasuk didalamnya dugaan manuver-manuver penjejalan Anies Baswedan untuk memuluskan jalan kontestasi bagi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.

### **Faktor Menguatnya Politik Kartel dalam Pilkada 2024**

Faktor terakhir yang menjadi penyebab gagalnya Anies Baswedan maju sebagai Calon Gubernur pada Pilkada Jakarta adalah semakin menguatnya gejala politik kartel dalam Pilkada dan dalam kepolitikan nasional secara umum. Faktor ini juga bersifat eksternal karena berada di luar pribadi dan kontrol Anies sendiri.

Politik kartel adalah gejala dimana partai-partai lebih memilih bergabung dalam satu kubu, baik dalam perhelatan elektoral untuk memenangkan Pemilu/Pilkada maupun dalam kerangka menguasai pemerintahan agar dapat mengendalikan sumberdaya kekuasaan dan ekonomi untuk kepentingan masing-masing partai. Merujuk pandangan Vedi R. Hadiz (2017) seperti dikutip Andi Suwarko, dalam konteks politik Indonesia, politik kartel sering kali menjadi alat bagi elit politik untuk mengendalikan kontestasi dan memastikan bahwa kepentingan mereka tetap terjaga, terlepas dari preferensi elektoral publik (2024). Gejala inilah yang mewarnai perhelatan Pilkada Jakarta 2024, yang kemudian melahirkan suatu anomali politik kandidasi, dimana figur populer yang dinilai warga Jakarta cakap dan pantas untuk dicalonkan justru tidak mendapatkan respon positif dari partai politik.

Dalam kasus kegagalan Anies, politik kartel bahkan menjadi salah satu faktor determinatif penyebab kegagalan itu. Pada konteks ini, partai-partai, setidaknya tiga partai pengusung Anies pada Pilpres 2024 yang sempat berencana mengusungnya kembali dalam Pilkada Jakarta kemudian mengendur semangatnya lalu memilih bergabung dengan kubu KIM Plus yang sedang mengendalikan kekuasaan di aras nasional. Dalam perspektif politik kartel ketiga partai ini menghitung secara elektoral, bahwa mencalonkan Anies Baswedan tidak akan memberikan keuntungan dan insentif baik secara politik maupun ekonomi. Alasannya Anies merupakan figur antitesis pemerintah, dianggap “pengganggu” stabilitas kekuasaan karena sikap dan pandangan-pandangannya yang kritis, dan oleh karenanya harus dihalangi agar ia tidak bisa maju sebagai kandidat Gubernur Jakarta.

Cara yang paling mudah membaca praktik politik kartel dalam konteks Pilkada Jakarta adalah dengan melihat perilaku partai-partai yang tergabung di kubu KIM Plus. *Pertama*, sejak dinamika awal perhelatan Pilkada Jakarta partai-partai di kubu KIM solid untuk hanya mengusung

figur dari barisan mereka dan yang disetujui oleh Prabowo sebagai leader koalisi pemerintahan. Anies Baswedan jelas bukan figur yang memenuhi kriteria ini.

*Kedua*, untuk meyakinkan dan memastikan Pilkada Jakarta dapat dimenangkan, kubu KIM mengubah nama koalisinya dengan menambahkan diksi “Plus” di belakangnya. Istilah ini digunakan untuk memberi ruang bagi partai-partai politik di luar KIM, terutama yang menjadi pengusung Anies dalam Pilpres 2024, yakni Nasdem, PKS dan PKB. Dan faktanya kemudian ketiga partai ini akhirnya merapat ke koalisi pemerintahan Prabowo setelah menjadi KIM Plus.

*Ketiga*, dengan manuver mengubah KIM menjadi KIM Plus, koalisi pemerintahan Prabowo berhasil mengonsolidasikan seluruh partai yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Jakarta, minus PDIP. Fakta ini menjelaskan, bahwa partai-partai pada akhirnya lebih memilih bergabung dalam kubu yang disiapkan dan didukung pemerintah untuk menghindari potensi ketidakberuntungan jika tidak ikut bergabung.

Melalui manuver-manuver politik yang demikian, dua pihak yang didefinisikan sebagai kekuatan oposisional pemerintah, yakni Anies Baswedan dan PDIP praktis terkunci langkah politiknya untuk berperan serta dalam kontestasi Pilkada. PDIP kemudian selamat dari dampak buruk manuver itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Sedangkan Anies Baswedan benar-benar terkunci karena seluruh partai sudah bergabung dalam kartel politik di bawah bendera KIM Plus. Sementara satu-satunya partai di luar KIM Plus yang masih mungkin mengusung Anies, yakni PDIP memilih mempromosikan kader internalnya sendiri, Pramono Anung dan Rano Karno.

## **KESIMPULAN**

Kegagalan Anies Baswedan untuk maju sebagai Calon Gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 disebabkan oleh dua faktor internal dan dua faktor eksternal. Faktor internal berkenaan dengan personalitas politik Anies sendiri yang sesungguhnya dapat dikontrol. Sementara faktor eksternal merupakan gejala yang berada di luar dan oleh karenanya tidak dapat dikontrol oleh Anies.

Dua faktor internal yang menjadi penyebab gagalnya Anies maju sebagai Calon Gubernur Jakarta adalah : *Pertama*, Anies bukan kader suatu partai politik. Padahal dalam konteks demokrasi elektoral, peran partai politik sangat dominan dalam menentukan arah kebijakan elektoral, termasuk penentuan pasangan kandidat yang dipromosikan. *Kedua*, independensi sikap politik Anies. Pilihan sikap ini sebetulnya tidaklah buruk apalagi jika dikaitkan dengan basis sosial Anies sebagai aktivis dan basis profesi Anies sebagai akademisi dan intelektual. Namun dalam kerangka

kepentingan politik elektoral independensi sikap politik ini menimbulkan kesan egois dan anti-kompromi. Padahal Pilkada adalah soal kepentingan politik pragmatik yang menuntut para pihak untuk bisa saling mengedepankan kompromi-kompromi tanpa harus mengesampingkan idealisme.

Sementara dua faktor eksternal yang menjadi penyebab gagalnya Anies maju sebagai Calon Gubernur Jakarta adalah: *Pertama*, menguatnya gejala partaikrasi dalam perhelatan Pilkada Jakarta. Anies gagal karena partai-partai politik yang memiliki otoritas sentral dalam kerangka kandidasi Pilkada Jakarta tidak melihat Anies sebagai figur yang tepat untuk dicalonkan. *Kedua*, menguatnya gejala politik kartel pada hampir semua partai politik. Dalam konteks kandidasi Pilkada Jakarta, semua partai politik lebih memilih bergabung dan bekerjasama dalam satu kubu koalisi yang didukung pemerintahan Prabowo karena pertimbangan bahwa mencalonkan Anies tidak akan memberikan keuntungan dan insentif baik politik maupun ekonomi.

Fakta bahwa Anies dikehendaki oleh mayoritas warga Jakarta sebagaimana ditunjukkan oleh hasil sigi lembaga-lembaga survei tidak memberikan pengaruh signifikan yang dapat mendorong partai-partai politik untuk mengambil keputusan mempromosikan Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur Jakarta periode 2025-2030.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Anggraini, Titi. "Menyoal Syarat Ketat Calon Perseorangan," *Perludem*, 27 April 2016; *Rumah Pemilu*, 2 September 2020 "Ubah Syarat Calon Perseorangan di Pilkada,"; *Media Indonesia*, "Syarat Calon Kepala Daerah Independen Dinilai Terlalu Berat," 13 Mei 2024. Diakses 14 Januari 2025, dari: <https://www.perludem.org>; <https://rumahpemilu.org>; <https://mediaindonesia.com>.
- Aniesbaswedan.com*. Rasyid Rasyid Baswedan. Diakses 11 Februari 2025, dari: <https://aniesbaswedan.com>.
- Asshiddiqi, J. (2006). *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bahtiar, H. (2016). "Kebangkitan Kembali Ruh Profetisme Muhammadiyah: Tinjauan Transformasi Sosial," *Jurnal Muhammadiyah Studies*, Vol. 1, No. 1, Juli 2016, hal. 69-71. Diakses 4 Januari 2025, dari: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jms/article/download/11410/7461/31435>

- BeritaSatu.com*. "Pileg 2019 Diprediksi Lahirkan Partitokrasi," 22 Maret 2019. Diakses 4 Januari 2025, dari: <https://www.beritasatu.com/news/544546/pileg-2019-diprediksi-lahirkan-partitokrasi>
- Blondel, J. (2002). Party Government, Patronage and Party Decline in Western Europe. Dalam Richard Gunther, Jose Ramon Montero dan Juan J. Linz (eds.). *Political Parties: Old Concepts and New Challenges*. Oxford: Oxford University Press.
- Budiardjo, M. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- CNN Indonesia.com* "KPU Tutup Pendaftaran, Pilgub Jakarta Akan Diikuti 3 Bakal Paslon," 30 Agustus 2024. Diakses 7 Januari 2025, dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240830004537-617-1139191/kpu-tutup-pendaftaran-pilgub-jakarta-akan-diikuti-3-bakal-paslon>.
- DetikNews.com*. "Kang Ace Sudah Bicara dengan Ridwan Kamil: Lebih Baik di Jabar," 7 Maret 2024. Diakses 7 Januari 2025, dari: <https://news.detik.com/pemilu/d-7229867/kang-ace-sudah-bicara-dengan-ridwan-kamil-lebih-baik-di-jabar>.
- DPP PKS. "PKS Resmi Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman Sebagai Cagub-Cawagub Jakarta," 25 Juni 2024. Diakses 12 Januari 2025, dari: <https://pks.id/content/pks-resmi-usung-anies-baswedan-sohibul-iman-sebagai-cagub-cawagub-jakarta>.
- DetikNews.com*. "RK Anggap Jabar atau Jakarta Sama Saja, tapi Zona Nyaman di Jabar," 24 Juli 2024. Diakses 7 Januari 2025, dari: <https://news.detik.com/pemilu/d-7455320/rk-anggap-jabar-atau-jakarta-sama-saja-tapi-zona-nyaman-di-jabar>.
- Efriza, N.F.N. (2019). Eksistensi Partai Politik dalam Persepsi Publik. *Jurnal Politica*, Vol. 10, No. 1, Mei 2019, hal. 17-38. Diakses 11 Februari 2025, dari: <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1314>.
- Hanafi, R.I (2014). Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, hal. 1-16. Diakses 22 April 2025, dari: <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=505050&val=10355&title=PEMILIHAN%20LANGSUNG%20KEPALA%20DAERAH%20DI%20INDONESIA%20BEBERAPA%20CATATAN%20KRITIS%20UNTUK%20PARTAI%20POLITIK>
- Haris, S. (2017). *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia dan Inteligencia Intrans Publishing.
- Harrison, L. (2009). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Katadata.com*. “Survei Indikator: Anies Unggul di Simulasi Pilkada Jakarta 2024.” Diakses 11 Februari 2025, dari: <https://databoks.katadata.co.id>, 26 Juli 2024.
- Katz, R.S. dan Peter Mair (1995). Changing Models of Party Organization and Party Democracy; The Emergence of the Cartel Party.” *Party Politics the International Journal for the Study of Political Parties and Political Organizations*, Vol. 1, No. 1, Januari 1955, hal. 5-28. Diakses 22 April 2025, dari: <https://doi.org/10.1177/1354068895001001001>.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. Diakses 10 Januari 2025, dari: <https://jdih.kpu.go.id/dkijakarta/keputusan-kpu&halaman-3>
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Diakses 10 Januari 2025, dari: <https://www.kpu.go.id>.
- Kompas.com*. “KPU: Syarat Partai Usung Cagub-Cawagub di Pilkada DKI 2024 Minimal 22 Kursi di DPRD,” 29 April 2024. Diakses 12 Februari 2025, dari: <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/04/29/17475861/kpu-syarat-partai-usung-cagub-cawagub-di-pilkada-dki-2024-minimal-22>.
- Kompas.com*. “PAN Buka Peluang Dukung Anies pada Pilkada Jakarta Asalkan Wakilnya Zita Anjani,” 22 Juli 2024. Diakses 15 Februari 2025, dari: <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/22/13543161/pan-buka-peluang-dukung-anies-pada-pilkada-jakarta-asalkan-wakilnya-zita>.
- Kompas.com*. “Pengamat: Anies Tidak Bisa Maju Pilkada karena Faktor Dirinya Sendiri,” 31 Agustus 2024. Diakses 15 Februari 2025, dari: <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/31/07010071/pengamat--anies-tidak-bisa-maju-pilkada-karena-faktor-dirinya-sendiri-?page=all>.
- Kompas.com*. “Suara Partai Pengusung Anies-Muhaimin Naik, Nasdem Klaim Koalisi Perubahan Pemenang Pemilu 2024,” 24 Maret 2024. Diakses 11 Februari 2025, dari: <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/24/17390501/suara-partai-pengusung-anies-muhaimin-naik-nasdem-klaim-koalisi-perubahan>.
- Kompas.com*. “Survei Litbang "Kompas" Pilkada Jakarta 2024: Anies 29,8 Persen, Ahok 20 Persen, Kaesang 1 Persen,” 16 Juli 2024. Diakses 11 Februari 2025, dari: <https://www.kompas.com>.
- Kompas.id*. “PKS Resmi Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman Jadi Cagub-Cawagub Jakarta,” 25 Juni 2024. Diakses 12 Januari 2025, dari: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/06/25/pks-resmi-usung-anies-baswedan-sohibul-iman-jadi-cagub-cawagub-jakarta>.

- Kumparan.com*. “Fahri Hamzah: Dulu Anies Didukung Biar Partai Tak Hilang, Kini ia Tak Diperlukan,” 12 Agustus 2024. Diakses 15 Februari 2025, dari: <https://kumparan.com/kumparannews/fahri-hamzah-dulu-anies-didukung-biar-partai-tak-hilang-kini-ia-tak-diperlukan-23JRLwFD8Dy>.
- Kristiadi, J. (2011). *Menuju Negara Partitokrasi?*, *Kompas.com*, 11 Oktober 2011. Diakses 4 Januari 2025, dari: <https://nasional.kompas.com/read/2011/10/11/01474646/menuju.negara.partitokrasi>.
- Lestari, Y.S. (2017). Kartel Politik dan Korupsi Politik di Indonesia. *Jurnal Pandecta*, Vol. 12, No. 1, Juni 2017, hal. 67-75. Diakses 12 Januari 2025, dari: <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/7820>.
- MacIvor, H. (1996). Do Canadian Political Parties Form a Cartel? *Canadian Journal of Political Science*, Vol. 29, No. 2, Juni 1996, hal. 317–333. Diakses 22 April 2025, dari: <https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-political-science-revue-canadienne-de-science-politique/article/do-canadian-political-parties-form-a-cartel/E6BABBEE5A651CA1657EFB881D30817F>
- Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. “MK Buka Peluang Parpol Tanpa Kursi di DPRD Ajukan Calon Kepala Daerah,” 20 Agustus 2024. Diakses 20 Februari 2025, dari: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21469&menu=2>.
- Mahpudin,. (2020). Konflik Pemilu: Dinamika Sengketa Calon Perseorangan dalam Kontestasi Elektoral di Kabupaten Lebak. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 2, September 2020, hal. 98-117. Diakses 22 April 2025, dari: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/7737/4619>
- March, J.G. dan Johan P. Olson. (1984). The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life. *The American Political Science Review*, Vol. 78, No. 3, September 1984, hal. 734-749. Diakses 23 April 2025, dari: <https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/new-institutionalism-organizational-factors-in-political-life/08291C1B13C55F098BE1C2A76C07A169>
- Marijan, K. (2022). *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Perdana, Ronaldo Adi dan A. Salman Maggalatung (2019). “Eksistensi Calon Perseorangan dalam Pemilukada di Indonesia,” *Jurnal STAATRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Vol. 3, No. 1, Juni 2019, hal.

- 4-5. Diakses 15 Februari 2025, dari: <https://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/staatsrech>.
- Sahdan, G. (2008). "Pilkada dan Problem Demokrasi Lokal". Dalam Gregorius Sahdan, at.al. *Politik Pilkada: Tantangan Merawa Demokrasi*. Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD). *SAIFULMUJANI Research & Consulting*. "Peluang Calon-calon Gubernur dalam Pilkada Provinsi Jakarta," 18 Agustus 2024. Diakses 15 Februari 2025, dari: <https://saifulmujani.com>.
- Smith, B.C. (2005). *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. London: George Allen & Ulwin.
- Sodikin,. (2014). Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Konteks Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Cita Hukum*, Vol.I, No. 1, Juni 2014. hal. 101-116. Diakses 21 April 2025, dari: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1453>
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta,.
- Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo.
- Sutisna, A. (2017). *Memilih Gubernur Bukan Bandit, Demokrasi Elektoral dan Pilgub di Tanah Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Suwarko, Andi. "Politik Kartel, Anies Baswedan, dan Pilkada Jakarta 2024: Operasi Politik yang Mengubah Arah Kontestasi." Diakses 14 Februari 2025, dari <https://uinsa.ac.id/blog/politik-kartel-anies-baswedan-dan-pilkada-jakarta-2024-operasi-politik-yang-mengubah-arah-kontestasi>.
- Tempo.co*. "Anies Baswedan Gagal Maju di Pilkada 2024, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Sebut Ada Tangan Mulyono dan Geng," 1 September 2024. Diakses 15 Februari 2025, dari: <https://www.tempo.co/politik/anies-baswedan-gagal-maju-di-pilkada-2024-ketua-dpd-pdip-jawa-barat-sebut-ada-tangan-mulyono-dan-geng-13749>.
- Tempo.co*. "Gerilya Partai Pendukung Jokowi Menjegal Anies Baswedan di Pilkada Jakarta," 11 Agustus 2024. Diakses 15 Februari 2025, dari: <https://www.tempo.co/arsip/kim-plus-menjegal-anies-baswedan-24552>.
- Tempo.co*. "KPU Jakarta Resmi Menetapkan 3 Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur Jakarta," 22 September 2024. Diakses 10 Januari 2025, dari: <https://www.tempo.co/politik/kpu-jakarta-resmi-menetapkan-3-pasangan-calon-dalam-pemilihan-gubernur-jakarta-7174>
- Tempo.co*. "PKB Sebut PKS Blunder karena Usung Anies-Sohibul: Bahaya Itu," 27 Juni 2024. Diakses 12 Januari 2025, dari:

<https://www.tempo.co/politik/pkb-sebut-pks-blunder-karena-usung-anies-sohibul-bahaya-itu-45382>.

*Tempo.co*. “PKS Raih Suara Terbanyak untuk DPRD DKI di Pemilu 2024 KPU RI,” 12 Maret 2024. Diakses 24 Februari 2025, dari: <https://www.tempo.co/politik/pks-raih-suara-terbanyak-untuk-dprd-dki-di-pemilu-2024-78501>; <https://infopemilu.kpu.go.id/>.

*Tirto.id*. “Fahri Hamzah: Bung Anies Perlu Introspeksi,” 12 Agustus 2024. Diakses 24 Februari 2025, dari: <https://tirto.id/fahri-hamzah-bung-anies-perlu-introspeksi-g2A7>.

*Tirto.id*. “Jejak Politik Anies Baswedan: Dari 2013 Kini Capres Pemilu 2024,” 29 Januari 2023. Diakses 16 Februari 2025, dari: <https://tirto.id/jejak-politik-anies-baswedan-dari-2013-kini-capres-pemilu-2024-gBDD>.

Triono,. (2017). Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Wacana Politik*. Vol. 2, No. 2, Oktober 2017, hal. 156-164. Diakses 22 April 2025, dari: <https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/14205>

Yishai,. Y. (2001). “Bringing Society Back In: Post-Cartel Parties in Israel” dalam *Party Politics*, Vol. 7, No. 6, November 2001, hal. 667–687. Diakses 8 Mei 2025, dari: [https://www.researchgate.net/publication/249731392\\_Bringing\\_Society\\_Back\\_in\\_Post-Cartel\\_Parties\\_in\\_Israel](https://www.researchgate.net/publication/249731392_Bringing_Society_Back_in_Post-Cartel_Parties_in_Israel)